



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online
(ePaper)*

SUBJEK

EKONOMI

Senin, 2 September 2024

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2024

Daftar Isi

1. PENGELUARAN KELAS MENENGAH SEMAKIN DIBEBANIN PUNGUTAN PAJAK DAN IURAN – *Media Online Kompas*
2. MENGEJAR TARGET AMBISIUS LEWAT MESIN BARU EKONOMI – *Media Online Media Indonesia*
3. KELAS MENENGAH MEROSOT EKONOMI BISA MELOROT – *Media Online Kontan*
4. MEMAKNAI KOLABORASI DALAM INVESTASI BERKELANJUTAN – *Media Online Investor Daily*
5. MENCAPAI TARGET SDGs DENGAN KERJA SAMA LINTAS NEGARA – *Media Online Investor Daily*

PEMBANGUNAN EKONOMI

Pengeluaran Kelas Menengah Semakin Dibeberatkan Pajak dan Iuran

JAKARTA, KOMPAS – Dalam lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat kelas menengah mengalami pergeseran. Di tengah penurunan daya beli, kelompok ini mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk sejumlah kebutuhan. Salah satu yang meningkat signifikan adalah pengeluaran untuk membayar pajak dan iuran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak dan iuran pada 2019 adalah 3,48 persen dari total pengeluaran. Pada 2024, porsi tersebut meningkat menjadi 4,53 persen dari total pengeluaran.

Jika dibandingkan dengan kelompok lain, beban pajak dan iuran yang ditanggung kelas menengah berbeda tipis dengan kelas atas. Sebagai perbandingan, pada 2024, pengeluaran kelas atas untuk membayar pajak iuran adalah 4,84 persen.

Menurut Deputy Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pajak yang dimaksud antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (STNK), serta Pajak Penghasilan (PPh 21). Sementara itu, pengeluaran kelas menengah untuk membayar pajak agar kewajiban pajak itu tidak menjadi beban di antara pengeluaran lainnya yang sudah tinggi.

"Jadi, isunya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah daya beli kelas menengah tanpa harus menciptakan masalah baru," katanya. Caranya adalah dengan menjaga daya beli dan meningkatkan

kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara. Kelas menengah menyumbang hingga 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen. Dengan total kontribusi 85,2 persen, kedua kelompok ini adalah penopang utama penerimaan pajak negara.

Namun, kedua kelompok ini juga kerap kurang diperhatikan. Mereka bukan kelompok miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Mereka juga tidak ikut menikmati keucuran insentif yang ditujukan pemerintah untuk kelas atas.

Meningkatkan daya beli

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan, mengingat kontribusi kelas menengah yang sangat besar bagi penerimaan pajak, solusi yang tepat bukanlah mengurangi kewajiban pajak kelas menengah. Namun, meningkatkan kemampuan kelas menengah untuk membayar pajak agar kewajiban pajak itu tidak menjadi beban di antara pengeluaran lainnya yang sudah tinggi.

"Jadi, isunya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah daya beli kelas menengah tanpa harus menciptakan masalah baru," katanya. Caranya adalah dengan menjaga daya beli dan meningkatkan

kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara. Kelas menengah menyumbang hingga 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen. Dengan total kontribusi 85,2 persen, kedua kelompok ini adalah penopang utama penerimaan pajak negara.

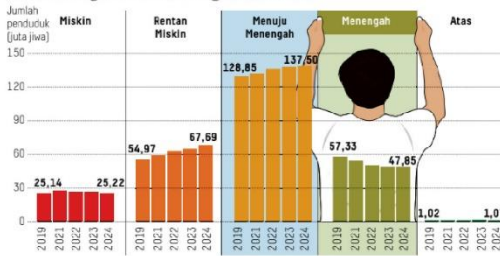
Namun, kedua kelompok ini juga kerap kurang diperhatikan. Mereka bukan kelompok miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Mereka juga tidak ikut menikmati keucuran insentif yang ditujukan pemerintah untuk kelas atas.

Meningkatkan daya beli

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan, mengingat kontribusi kelas menengah yang sangat besar bagi penerimaan pajak, solusi yang tepat bukanlah mengurangi kewajiban pajak kelas menengah. Namun, meningkatkan kemampuan kelas menengah untuk membayar pajak agar kewajiban pajak itu tidak menjadi beban di antara pengeluaran lainnya yang sudah tinggi.

"Jadi, isunya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah daya beli kelas menengah tanpa harus menciptakan masalah baru," katanya. Caranya adalah dengan menjaga daya beli dan meningkatkan

Perkembangan Kelas Menengah Indonesia



Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pascapandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat.

Papazasi kelas menengah di 2024 (17,13%) lebih rendah dibandingkan 2019 (21,45%).

Pada 2024, jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah sebanyak 185,35 juta orang (86,35%) lebih sedikit daripada tahun 2019 (186,18 juta orang atau 86,85% dari total penduduk).

Sumber: BPS

menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat kelas menengah memang berubah seiring dengan tren menurunnya daya beli kelompok tersebut.

Sebagai contoh, porsi pengeluaran untuk makanan semakin besar. Pada 2019, pengeluaran kelas menengah untuk makanan hanya 41,05 persen dari total konsumsinya. Namun, pada 2024, porsi ini meningkat menjadi 41,67 persen.

nomi bahwa pengeluaran yang dialokasikan seseorang untuk makanan akan meningkat ketika pendapatannya menurun. Itu karena makanan adalah kebutuhan paling dasar sehingga seseorang akan mempertahankan tingkat konsumsi makanannya meski pendapatannya lebih rendah.

Porsi pengeluaran kelas menengah untuk kebutuhan dasar lainnya, yakni perumahan, juga meningkat cukup signifikan. Pada 2019, porsi pengeluaran

untuk perumahan hanya 27,8 persen. Pada 2024, meningkat menjadi 28,52 persen.

Amalia menjelaskan, pengeluaran untuk perumahan itu tidak mencakup kebutuhan membayar cicilan kredit pembelian rumah (KPR). "Perumahan itu hanya untuk perbaikan sewa rumah, perbaikan rumah, dan barang-barang perlengkapan rumah, seperti mesin cuci, mebel, kulkas," katanya. Jenis pengeluaran ketiga yang naik cukup signifikan ada-

lah barang dan jasa lainnya. Porsi pengeluaran ini meningkat dari 6,04 persen pada 2019 menjadi 6,48 persen pada 2024. Jenis konsumsi ini termasuk pengeluaran untuk kebutuhan keseharian di era modern, seperti transportasi publik, internet, dan listrik.

"Ini mengapa barang dan jasa lainnya juga menjadi pengeluaran prioritas kelas menengah. Di situ ada kebutuhan untuk komunikasi, ponsel, internet, semua di situ," ujar Amalia.

Di luar itu, pengeluaran barang dan jasa lainnya juga mencakup kebutuhan sehari-hari, seperti perlengkapan mandi, perawatan kecantikan, perawatan kulit, pemeliharaan pakaian, serta aneka barang lainnya. Porsi pengeluaran itu juga termasuk untuk jasa, seperti pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dan jasa foto.

BPS mengategorikan pengeluaran kelas menengah pada tahun 2024 di kisaran Rp 2.040.262 per kapita per bulan hingga Rp 9.909.844 per kapita per bulan. Nilai modulus dari urutan data pengeluaran itu ada di angka Rp 2.056.494 per kapita per bulan.

Artinya, mayoritas pengeluaran kelas menengah Indonesia ada di sekitar Rp 2.056.494 per kapita per bulan. Selisihnya sangat dekat dengan batas bawah modul dengan batas bawah modul pengeluaran, hanya berbeda Rp 16.232. Jika pengeluarannya turun di atas Rp 16.232, kelas menengah sudah bisa dikategorikan turun kelas. (AGE)

Senin, 2 September 2024

Mengejar Target Ambisius lewat Mesin Baru Ekonomi

Salah satu mesin yang akan diandalkan ialah industri hilirisasi karena memberi multiplier effect bagi ekonomi dengan peningkatan nilai tambah bahan baku, menarik investasi masuk ke Tanah Air, serta menambah jumlah serapan tenaga kerja.

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

PASANGAN presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di era pemerintahan mereka yang akan dimulai pada 20 Oktober nanti. Berbagai masalah mendasar mesti segera ditangani untuk mengejar target yang terbilang ambisius itu.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menyampaikan untuk mengejar ambisi tersebut diperlukan optimalisasi mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru. Mesin tersebut berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi pada masa depan, tidak bisa hanya mengandalkan mesin konvensional yang sudah ada seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

"Untuk target 8%, menurut saya ambisius, tapi perlu dilakukan. Pemerintah mesti merevitalisasi mesin konvensional yang ada sekarang dengan membangun mesin ekonomi baru melalui digitalisasi, semikonduktor, artificial intelligence, ekonomi hijau, ekonomi biru ditambah dengan bioteknologi," jelasnya dalam seminar Optimisme Baru Pembangunan Ekonomi Era Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (29/8) lalu.

Hal itu, ungkap Raden, disempurnakan dengan mesin ekonomi Pancasila atau berkeadilan dengan menjaga kesinambungan sosial ekonomi melalui pengembangan di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Ia mencontohkan salah satu program andalan Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis. Program itu bertujuan meningkatkan kecukupan gizi, peningkatan kecerdasan anak, dan pencegahan stunting.

Secara ekonomi, kata Raden, prog-

ram itu dapat memberi tambahan pertumbuhan domestik sebesar 1,2%. Itu disebabkan program tersebut melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai unit dapur umum untuk menyediakan makan gratis.

"Mesin Pancasila ini adalah untuk memeratakan pertumbuhan ekonominya," imbuhnya.

Mesin pertumbuhan lainnya ialah kebutuhan tambahan investasi yang amat besar di industri hilirisasi. Upaya itu untuk mendapatkan multiplier effect atau dampak berganda bagi ekonomi dengan peningkatan nilai tambah bahan baku, menarik investasi masuk ke Tanah Air, serta menambah jumlah serapan tenaga kerja.

"Kita butuh investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) sebesar US\$800 miliar sampai US\$1.000 miliar untuk lima tahun ke depan. Pemerintah perlu meningkatkan sektor hilirisasi ke depannya," kata ekonom senior itu.

Perdagangan karbon

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Laode M Kamaluddin, menyampaikan upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sampai 8% salah satunya ialah investasi hijau lewat perdagangan karbon.

Berdasarkan data McKinsey pada 2023, permintaan pasar karbon internasional akan meningkat 29% per tahun hingga 2030 dan meningkat lagi hingga 2050.

Hal itu menjadi kesempatan emas bagi Indonesia karena memiliki potensi tinggi terhadap kredit karbon dunia yang mencapai Rp8.000 triliun.

Pemerintahan Prabowo-Gibran berencana akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK) untuk menangani perubahan iklim dan tata niaga karbon.



Tantangan Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

- Pendanaan
- Infrastruktur
- Regulasi dan birokrasi
- Kualitas sumber daya manusia
- Stabilitas politik dan keamanan
- Ketergantungan pada impor

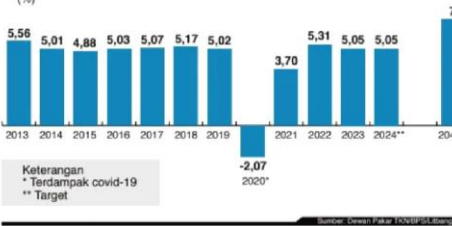
Sumber Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 8%

- Investasi
- Penguatan pasar dalam negeri
- Hilirisasi sumber daya alam
- Pengembangan UMKM
- Infrastruktur
- Reformasi regulasi dan birokrasi

Strategi Utama Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Pada 2028

- Meningkatkan rasio investasi terhadap PDB hingga sekitar 40,6%, termasuk investasi hijau yang diharapkan membantu mencapai target pengurangan karbon sebesar 30%.
- Penguatan industri dalam negeri dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pengolahan bioetanol dan biodiesel, serta pengembangan proyek langguk laut.
- Peningkatan investasi asing langsung, termasuk pembangunan pusat data AI, carbon capture and storage, serta hilirisasi nikel, timah, tembaga, dan bauksit.
- Penguatan UMKM dengan program makan siang bergizi gratis, renovasi rumah dan sekolah, serta pengembangan infrastruktur.
- Pengendalian barang impor dengan memperkuat peraturan dan pengawasan.

Laju Pertumbuhan Rata-Rata Ekonomi Indonesia (%)



Laode menurunkan kehadiran BPPPI-TNK dapat menciptakan peluang bagi sektor publik dan swasta untuk mem-

biayai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor usaha. Upaya itu diyakini dapat membantu

pertumbuhan ekonomi nasional. "Pembentukan BPPPI-TNK sangat penting untuk meningkatkan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," kata Laode.

Suku bunga

Head of Macroeconomics and Financial Research PT Bank Mandiri Dian Ayu Yustina berpandangan kondisi pasar saat ini tengah masuk periode optimisme karena menunggu pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) Fed funds rate/FFR pada September ini. Semua bank sentral di dunia pun tengah menunggu pemangkasan suku bunga, termasuk Indonesia.

"Semua bank sentral sudah hampir akan membuka ruang untuk penurunan sebuah bunga. Begitu juga dengan Bank Indonesia," ujarnya.

Penurunan suku bunga AS pun menjadi angin segar bagi negara berkembang karena ada aliran modal masuk asing (capital inflow) yang masuk dari negara maju. Pemangkasan FFR yang diperkirakan terjadi dua kali pada tahun ini akan berdampak pada penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US treasury). Dampaknya, investor bakal berbondong-bondong masuk pasar negara lain untuk mencari hasil yang lebih menarik. Hal itu memicu pelemahan nilai tukar dolar AS.

"Kita harus bisa menarik capital inflow. Investasi ini sangat penting untuk mendorong ekonomi," ucapnya.

Dian menyebut saat ini aliran dana asing masih banyak masuk ke instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) karena ada indikasi pemerintah mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total modal asing masuk bersih di SRBI mencapai Rp187,66 triliun dari 1 Januari hingga 29 Agustus 2024. Sementara itu, modal asing yang masuk di pasar SBN sebesar Rp9,20 triliun.

"Sehingga kalau kebutuhan obligasinya juga menurun, investor asing juga melihat ini dengan masuk ke SBN yield relatif lebih rendah sehingga BI kemudian mengeluarkan SRBI yang menawarkan yield lebih tinggi. Jadi, capital inflow banyak masuk di SRBI," jelasnya. (E-2)

Kelas Menengah Merosot Ekonomi Bisa Melorot

Beban pajak dan iuran kelas menengah tahun ini mendekati pengeluaran pajak kelas atas

Perkembangan Kelas Menengah Indonesia

Kelas Pengeluaran	2019		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah (juta)	Proporsi (%)	Jumlah (juta)	Proporsi (%)	Jumlah (juta)	Proporsi (%)	Jumlah (juta)	Proporsi (%)	Jumlah (juta)	Proporsi (%)
Miskin	25,14	9,41	27,54	10,14	26,16	9,54	25,90	9,36	25,22	9,03
Rentan Miskin	54,97	20,56	58,32	21,47	62,52	22,80	64,43	23,28	67,69	24,23
Menuju Kelas Menengah	128,85	48,20	130,82	48,17	134,93	49,21	136,92	49,47	137,50	49,22
Kelas Menengah	57,33	21,45	53,83	19,82	49,51	18,06	48,27	17,44	47,85	17,13
Kelas Atas	1,02	0,38	1,07	0,40	1,08	0,40	1,26	0,46	1,07	0,38

Sumber: Badan Pusat Statistik

Status Pekerjaan Kelas Menengah (%)

Status	2019	2021	2022	2023	2024
Formal	61,71	59,13	58,07	58,65	59,36
Informal	38,29	40,87	41,93	41,35	40,64

Sumber: Badan Pusat Statistik

Porsi Konsumsi Masyarakat per Kelompok Pengeluaran (%)

Kelas	2019	2021	2022	2023	2024
Menuju Kelas Menengah	40,64	41,62	42,55	42,53	43,21
Kelas Menengah	43,39	41,35	39,57	38,80	38,28
Menuju Kelas Menengah dan Kelas Menengah	84,03	82,97	82,12	81,33	81,49

Siti Masitoh, Dendi S, Bidara Deo, Nuryandriani S.

JAKARTA. Berbagai tekanan, seperti beban pajak dan kenaikan harga barang terus membayangi warga kelas menengah. Padahal kelompok ini paling dominan menggotong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Akibat sejumlah tekanan, jumlah warga kelas menengah di Indonesia menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta dan tahun ini turun menjadi 47,85 juta. Di sisi lain, jumlah masyarakat menuju kelas menengah di periode yang sama meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta (lihat tabel).

Tak hanya itu, masyarakat kelas menengah yang beker-

ja di sektor formal juga turun dari 2019 sebanyak 61,71%, menjadi 2023 sebesar 58,65%. Saat yang sama, kelas menengah yang bekerja di sektor informal naik dari 2019 sebanyak 38,29% menjadi 40,6% pada 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai, kelas menengah adalah pendorong perekonomian Indonesia karena belanja kelompok ini besar. "Mereka senang *spending* dan juga cepat mengeluarkannya," kata dia, Jumat (28/8).

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, beban pajak atau iuran kelas menengah tahun ini setara 4,53% dari total pengeluaran, mendekati pengeluaran pajak masyarakat kelas atas sebesar 4,84%. Pembayaran pajak itu di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (STNK), asuransi.

Sementara itu, retribusi iuran di antaranya untuk iuran RT/RW, sampah, keamanan, kuburan, asuransi dan lainnya. Belum lagi pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan periode 2014-2016 menilai, penurunan jumlah kelas menengah akan mengurangi daya beli. Hal ini akan berefek ke setoran PPh seirama penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor formal. Alhasil, tekanan daya beli turut menghambat ekonomi. "Kalau pekerja formal kena PHK dan pindah ke sektor informal, berarti tak lagi menjadi pembayar PPh Pasal 21," kata dia, kemarin.

Bambang juga melihat, kebiasaan mengonsumsi air kemasan dan galon bisa jadi pemicunya. Tanpa disadari penggunaan air galon terma-

suk pengeluaran cukup besar bila diakumulasi. Dia berharap pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur air bersih agar masyarakat tak lagi bergantung air kemasan.

Untuk menyelamatkan kelas menengah, investasi perlu didorong demi menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Pemerintah juga harus menjaga agar biaya hidup dasar seperti pangan, rumah, transportasi, tidak memberatkan masyarakat kelas menengah. "Ditambah insentif pajak seperti PPN untuk rumah sederhana dan subsidi terkait kebutuhan dasar seperti bahan bakar, tapi harus yang terbarukan," ucap Bambang.

Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, kelas menengah telah terabaikan selama lima tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah terlalu fokus pada kelompok

20% terbawah dan 10% teratas dalam hal pendapatan.

Ada beberapa gangguan kebijakan pemerintah yang saat ini menimbulkan tantangan bagi kelas menengah. Misalnya, rencana mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Dari simulasi yang ia lakukan, kenaikan ini tak akan menghasilkan pendapatan negara signifikan, namun berefek negatif terhadap belanja konsumen dan inflasi yang bisa menambah beban kelas menengah.

Alih-alih bansos, ia bilang, kelas menengah butuh pekerjaan yang dapat memutar pendapatan. "Temuan kami menunjukkan, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hanya sekitar 19% adalah kunci," tegas Fithra. ■

INVESTOR DAILY

INDONESIA

SENIN, 2 SEPTEMBER 2024

Memaknai Kolaborasi dalam Investasi Berkelanjutan

Kita berpacu dengan waktu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang termaktub dalam komitmen global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Setelah perjalanan menuju tahun 2030 sudah dilewati.

Tapi, bagaimana pencapaian aksi kolektif global SDGs ini?



Oleh Shinta Widjaja Kamdani *)

Dalam pertemuan *SDG Summit* tahun lalu yang dihadiri banyak pemimpin negara, komitmen global sejak tahun 2015 tersebut masih jauh panggang dari api. Baru sekitar 12% dari keseluruhan tujuan SDGs yang *on track*. Stagnasi akibat krisis multidimensi dan situasi geopolitik yang dihadapi dunia, menjadi hambatan pencapaian. Misalnya saja, masih ada 735 juta orang mengalami kelaparan dengan estimasi mencapai angka hanya 600 juta orang di tahun 2030.

Pendanaan dan investasi adalah salah satu *key enabler* mencapai target agenda 2030 yang membutuhkan dana triliunan dolar per tahun. Memang angka investasi berkelanjutan tak dimungkir, meningkat. Tetapi *investment gap* masih menjadi pekerjaan rumah, mencapai US\$ 4 triliun, baik dari angka US\$ 2,5 triliun di tahun 2015, khususnya bagi negara berkembang. Sehingga, utilisasi peluang investasi melalui mobilisasi sektor privat adalah imperatif, tidak hanya melalui adopsi SDGs dalam *business operation* sektor usaha.

Bagaimana pun investasi pembangunan berkelanjutan memiliki makna penting dalam percepatan tujuan SDGs, baik dalam konteks pengembangan sosial, lingkungan, juga ekonomi. Khususnya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan semata, tapi juga menilik faktor lingkungan dan sosial secara holistik agar menjadi investasi yang bertanggung jawab.

Peranan Sektor Privat Melalui UN-GISD Alliance

Investasi pembangunan berkelanjutan mencakup koneksi terintegrasi lewat peningkatan kemitraan pemerintah. Menyadari pentingnya masalah tersebut, PBB kemudian mendirikan *Global Investor for Sustainable Development*

(*GISD*) *alliance* yang terdiri atas 30 CEO berbagai negara yang berasal dari sektor finansial-non finansial, bertujuan melakukan mobilisasi sektor privat dalam menjadi bagian solusi pendanaan investasi berkelanjutan.

Sebagai aliansi yang menggerakkan kolaborasi pemangku kepentingan, *GISD* mendorong investor, -termasuk institusi keuangan dan investor swasta, - untuk meningkatkan komitmen terhadap *impact investing*. Juga mengidentifikasi peluang investasi berkelanjutan, memetakan solusi atas hambatan investasi-pendanaan. Aliansi yang didirikan tahun 2019 juga mengemban

task dan pembiayaan berkelanjutan berkinerja lebih baik dari investasi tradisional.

Beberapa *output* penting dari aliansi di antaranya adalah pengembangan *Sustainable Development Investing (SDI) Navigator*, panduan untuk mengintegrasikan SDGs dalam analisis investasi, pengambilan keputusan, membentuk sistem *monitoring* serta mengelola *impact* terhadap portofolio investasi. Mengembangkan *Sector Specific SDG related metrics* sebagai panduan investor mengintegrasikan pembiayaan dengan SDGs dan mengukur dampak. Selain itu, dikembangkan *Model Mandate* sebagai

perluasan perspektif berkelanjutan dengan memetakan hubungan antara as-



set owners - managers. *GISD alliance* juga meluncurkan *MDB*

report sebagai rekomendasi kebijakan pemangku kepentingan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menjadi katalisator sektor privat menerapkan SDGs.

Aspek pendanaan yang menjadi fokus penting aliansi adalah dengan menghasilkan *Sovereign SDG Bonds*, panduan *sovereign bonds* melalui penilaian pasar dengan mengidentifikasi praktik terbaik dari pengalaman berbagai negara dan investor institusional global. *GISD alliance* juga meluncurkan *UNDP-GISD SDGs Investor Platform* sebagai *transformative blended finance vehicles* untuk menggerakkan *Multilateral Development Banks* serta investor institusional dalam mendanai infrastruktur berkelanjutan di *emerging markets and developing economies*.

Melalui keterwakilan sektor swasta Indonesia sekaligus sebagai ketua bersama yang memimpin

aliansi, sektor swasta kita perlu dengan cermat memanfaatkan peluang untuk terhubung dengan *key actor* sektor finansial global sebagai representasi negara maju. Kita perlu cepat melakukan kolaborasi yang tepat bersama *key actor GISD alliance* yang tidak hanya terdiri atas komunitas sektor privat global yang sebagian besar berasal dari sektor perbankan dunia. Tetapi juga dengan berbagai organisasi global lain sebagai partner aliansi. Seperti UN DESA, UNEP FI, World Bank, International Finance Corporation, serta berbagai perwakilan *standard setter* global.

Organisasi usaha dan sektor usaha Indonesia perlu melakukan diplomasi ekonomi untuk realisasi *showcasing* proyek berkelanjutan yang krusial bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi hijau negeri ini. Gelaran *Indonesia International Sustainability Forum* yang akan diselenggarakan pada awal September 2024 ini, bisa menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendukung peluang investasi hijau, karena pada gelaran ini dipertemukan para *key business leaders*, CEO dunia, dan pakar keberlanjutan yang memiliki komitmen sama untuk mendorong terobosan bisnis yang selaras dengan SDGs.

Peranan sektor privat melalui *outreach and engagement* adalah fundamental untuk menjawab tantangan *green financing* Indonesia sebagai *emerging-developing countries*. Tidak hanya untuk mengurai masalah pendanaan semata, tetapi juga menjawab tantangan pengelolaan risiko dari mulai keuangan, teknis hingga regulasi, serta keterbatasan infrastruktur yang mendukung proyek berkelanjutan. Sehingga kolaborasi antarpemangku kepentingan di tataran global untuk akselerasi pendanaan investasi hijau adalah kunci.

Sektor usaha Indonesia perlu bertindak cepat, cermat dan tepat agar cita-cita besar Indonesia Emas 2045, tidak menjadi ilusi belaka, yang menghambat tujuan kemakmuran bersama bagi Indonesia yang sejahtera. Mengutip Plato lewat karya *Allegory of the Cave*, "Kita tidak bersikap patut karena kita sudah sempurna. Faktanya, kita hanya bisa sempurna hanya dengan bertindak patut". Jadi, langkah kecil melalui *responsible investment* dari sektor usaha harus segera dimulai, agar menjadi warisan berharga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

*) Co-Chair UN - GISD alliance. Ketua Umum Apindo.

INVESTOR DAILY

INDONESIA

SENIN, 2 SEPTEMBER 2024

Mencapai Target SDGs dengan Kerja Sama Lintas Negara

NUSA DUA, ID – Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama internasional untuk mencapai target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan sejumlah inisiatif strategis, Indonesia mendorong kesejahteraan global dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh **Arnoldus Kristianus**

“Selama periode 2021-2022, Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, *workshop*, seminar, dan berbagi pengetahuan dengan negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi tetapi juga berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan,” ungkap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widayanti dalam keterangan resminya di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024). Amalia menyebutkan bahwa sekitar 63% indikator TPB/SDGs di Indonesia telah mencapai target, sementara 16% indikator lainnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan global dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian TPB/SDGs di kelompok negara berpenghasilan menengah atas,” terang Amalia.

Peran aktif Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular juga menjadi contoh. Sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan riset ekonomi antar negara berkembang. Dalam laporan global terbaru mengenai TPB/SDGs

yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi 102 pada 2019 menjadi 75 pada 2023.

Untuk mendukung proyek pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah mengadopsi metode pembiayaan inovatif seperti *blended finance*. Salah satu contoh penerapan *blended finance* adalah pembangunan desa wisata di Bali, yang memobilisasi investasi dan membangun infrastruktur tanpa membebani APBN atau APBD. Skema ini mencakup berbagai sumber dana, termasuk dari sektor swasta, untuk menciptakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan.

“Metode pembiayaan ini memungkinkan kita untuk menggabungkan sumber daya publik dan swasta, yang tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang,” kata Amalia.

Dia juga menekankan pentingnya Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang diselenggarakan pada 1-3 September 2024 di Bali. Forum tersebut akan menjadi platform bagi para pemimpin global, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi praktis dalam mempercepat pencapaian pembangunan dan memperkuat perekonomian negara-negara berkembang. “Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan sosi-

al,” kata Amalia.

17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

4 Pilar SDGs RI



Pilar Pembangunan Sosial

Tanpa kemiskinan
Tanpa kelaparan
Kehidupan sehat & sejahtera
Pendidikan berkualitas
Kesetaraan gender



Pilar Pembangunan Ekonomi

Energi bersih & terjangkau
Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi
Industri, inovasi, & infrastruktur
Berkurangnya kesenjangan
Kemitraan mencapai tujuan



Pilar Pembangunan Lingkungan

Air bersih
Sanitasi layak
Konsumsi & produksi yang bertanggung jawab
Penanganan perubahan iklim
Ekosistem lautan
Ekosistem daratan



Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

Pendamai, keadilan, & kelembagaan yang kuat

SUMBER: BAPPENAS

al,” kata Amalia.

Dengan komitmen kuat dan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, Indonesia terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama internasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Forum HLF MSP 2024 di Bali diharapkan menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi global dan mencapai tujuan bersama dalam pembangunan berkelanjutan.

Skema KPBU

Sementara itu, Indonesia bakal

mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko menyebutkan, skema KPBU akan menjadi salah satu isu yang dibahas oleh Indonesia dalam diskusi pembiayaan inovatif di HLF MSP 2024.

“Kita mempunyai skema KPBU,

tapi kita masih harus memperbaiki skemanya karena ini melibatkan pemerintah dan sektor swasta, sehingga *appetite risk*-nya ditanggung bersama. Jadi, ini terus kita perbaiki,” kata Bogat saat ditemui usai konferensi pers di Badung, Bali, Minggu (1/9/2024).

HLF MSP 2024 melibatkan 26 negara, yang terdiri atas 782 perwakilan pemerintah, 102 dari organisasi internasional, 107 dari organisasi non-pemerintah, 128 dari sektor swasta, 8 filantropi, 9 lembaga *think tank*, 56 komunitas akademisi, 9 bank multilateral, dan 70 petugas keamanan.

Untuk itu, melalui diskusi HLF MSP, pemerintah berharap bisa memperoleh wawasan mengenai pembiayaan inovatif, terutama dari negara-negara maju yang sudah menerapkan skema ini. “Pembiayaan inovatif ini semacam rekayasa finansial. Ini jamak di negara maju, tapi belum familier di negara-negara berkembang. Di forum inilah kita ingin berbagi pengalaman, seperti dari filantropi dan lain sebagainya,” ujar dia.

Sebelumnya, Bogat menyebut Indonesia menargetkan dapat melahirkan perumusan pembiayaan alternatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui HLF MSP 2024. “Salah satu kendala dalam pencapaian SDGs adalah ketersediaan pembiayaan. Ini kita coba atasi bersama dengan merumuskan pembiayaan alternatif untuk membiayai berbagai macam upaya yang harus dilakukan dalam percepatan SDGs,” tutur Bogat. (ant)